

BAB III

**GAMBARAN UMUM PKPU JAWA TENGAH DAN PENGELOLAAN ZIS
DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIQ MENJADI
MUZAKKI**

3.1. Gambaran Umum PKPU Jawa Tengah

3.1.1. Sejarah PKPU

PKPU lahir dari rahim sebuah partai politik yang berhaluan Islam yaitu Partai Keadilan (PK). Awalnya PKPU merupakan sebuah lembaga struktural kemasyarakatan. Lembaga ini tepatnya adalah Departemen Kesejahteraan Sosial (Depkessos) Partai Keadilan. Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi cukup parah. Menyikapi krisis yang berkembang sejumlah anak muda aktif dengan ketetapan hati yang kuat bergandeng tangan dan bergerak menyumbangkan tenaga dan pikirannya melakukan aksi sosial di sebagian besar wilayah Indonesia. Di bawah bendera Depkessos Partai Keadilan, kegiatan sosial kemasyarakatan ini pada awalnya menggunakan nama Pos Terpadu Pelayanan Masyarakat (Poster Masyarakat). Setelah keluar dari struktur Partai Keadilan dan menjadi yayasan tersendiri yang tidak berkaitan dengan Partai Keadilan, nama Poster Masyarakat berubah menjadi Pos Keadilan Peduli Umat pada tanggal 10 Desember 1999 dengan badan hukum yayasan. Kemudian PKPU menisbatkan dirinya sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial (Bamualim, 2005: 176).

Pada 8 Oktober 2001, berdasarkan SK. Menteri Agama No 441 PKPU telah ditetapkan sekaligus dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada PKPU semakin besar. Seiring dengan meluasnya jangkauan kegiatan sosial yang terus disalurkan ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia serta besarnya dorongan masyarakat luas untuk bekerjasama dalam memberdayakan bangsa, maka pada tahun 2004, PKPU bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia dengan memperluas lingkup kerjanya sebagai Lembaga Kemanusiaan Nasional.

Kiprah PKPU sebagai pegiat kemanusiaan terukir jelas dalam partisipasinya berdampingan dengan NGO Internasional dari manca negara mengatasi keadaan darurat tanggap bencana serta fase pembangunan kembali bencana-bencana besar yang menimpa tanah air kita seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh, Yogyakarta, dan beberapa peristiwa lainnya. Sebagai lembaga yang semakin kokoh dalam menangani isu-isu kemanusiaan global maka tuntutan standarisasi kerja serta pengembangan program telah mencambuk PKPU untuk mengedepankan peningkatan mutu program dan layanan dengan menghasilkan kontribusi yang solutif bagi masyarakat. Tuntutan tersebut dijawab dengan diterimanya PKPU sebagai lembaga dengan status "*NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations*", dan telah memperoleh register di PBB pada 21 Juli 2008, yang

menuntut akuntabilitas kinerja kemanusiaan secara periodik sebagai konsekuensi status yang disandang. Kemudian pada tahun 2010, PKPU juga telah resmi terdaftar sebagai Organisasi Sosial Nasional berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No.08/Huk/2010 (Dokumentasi PKPU dan wawancara dengan Haryono tanggal 26 Oktober 2011).

3.1.2. Visi dan Misi PKPU Jawa Tengah

Visi yang diusung PKPU Jawa Tengah adalah “*Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian*”. Dengan visi tersebut, PKPU bertekad untuk menjadi lembaga filantropi Islam terdepan dalam membela kepentingan umat dengan mengedepankan pengelolaan yang amanah dan profesional.

Kemudian misi yang dibangun PKPU Jawa Tengah adalah misi kemanusiaan meliputi tiga kegiatan, yaitu:

- 1) Mendayagunakan program *rescue*, rehabilitasi dan pemberdayaan untuk mengembangkan kemandirian.
- 2) Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.
- 3) Memberikan pelayanan informasi, edukasi dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat (*beneficiaries*) (Wawancara dengan Haryono tanggal 26 Oktober 2011).

3.1.3. Program Kerja PKPU Jawa Tengah

Program yang dilakukan PKPU Jawa Tengah secara garis besar terdiri atas empat bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan gawat darurat (*rescue*). Dari keempat bidang tersebut masing-masing mempunyai program, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Program Kerja PKPU Jawa Tengah tahun 2011

No	Kegiatan	Sasaran
I	Pendidikan	
	1. Kelas pelatihan ketrampilan	Pemuda pengangguran
	2. Bimbingan belajar	Siswa-siswi SD, SMP, SMA dhuafa'
	3. Beasiswa produktif	Mahasiswa dhuafa' yang produktif
	4. Beasiswa terpadu	Siswa-siswi SD, SMP, SMA dhuafa'
	5. Sekolah gratis TK An-Nur	Anak dhuafa
	6. Pemberdayaan anak jalanan	Anak jalanan dan orang tuanya
II	Kesehatan	
	1. PROSMILING (Program Kesehatan Masyarakat Keliling)	Komunitas miskin dan jauh dari fasilitas kesehatan
	2. BUDARZI (Ibu Sadar Gizi)	Komunitas rawan gizi buruk
	3. Klinik peduli	Dhuafa' dan khalayak umum
	4. Klinik bersalin	Ibu hamil dhuafa

	5. Program layanan antar jenazah 6. Komunitas hijau	Dhuafa' dan khalayk umum Komunitas dengan sanitasi kurang baik
III	Ekonomi/ PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi)	
	1. Pengelolaan KSM dan pembentukan KSM baru 2. Pelatihan kewirausahaan	Dhuafa' produktif Anggota KSM
IV	Gawat darurat (<i>rescue</i>)	
	1. CBDRM (<i>Cummunity Based Disaster Risk Management</i>) Tanggap bencana 2. Latihan Tim relawan	Daerah bencana Relawan lintas Kab/Kota

Sumber: Dokumentasi PKPU Jawa Tengah tahun 2011

PKPU Jawa Tengah juga mempunyai program unggulan dari keempat bidang di atas. Adapun program unggulan PKPU Jawa Tengah ada 7 program, yaitu:

1) Program CBDRM (*Community Based Disaster Risk Management*)

Penanggulangan risiko bencana oleh komunitas merupakan upaya pemandirian masyarakat dalam menghadapi risiko bencana yang kerap dihadapi. Komunitas terlibat dan bertanggung jawab terhadap program sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan akan mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas

komunitas dalam penanggulangan bencana secara swadaya. Dengan demikian menghindari ketergantungan komunitas pada pihak eksternal. PKPU menghadirkan program ini dalam rangka mengalihkan kesigapan penanganan bencana dari para pegiat tanggap darurat bencana kepada masyarakat potensi korban bencana. Dengan demikian tindakan penanganan bencana akan lebih cepat dilakukan dan meminimalisir resiko dari potensi bencana yang terjadi.

2) Ibu Sadar Gizi (BUDARZI)

Program Pondok Gizi Budarzi (PG Budarzi) merupakan program gizi masyarakat yang berorientasi pada pemeliharaan kesehatan dan gizi balita, pembangunan kesadaran masyarakat khususnya ibu untuk menerapkan kaidah gizi dan kesehatan dalam menyusun menu keluarga khususnya balita, mendampingi dan melayani serta memanfaatkan potensi lokal dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki status gizi masyarakat.

3) PROSMILING

Program Kesehatan Masyarakat Keliling Terpadu (PROSMILING TERPADU) yaitu program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan di satukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan. Selain PROSMILING, PKPU

memiliki program Klinik Peduli yang didirikan di daerah-daerah minus dan bencana.

4) Program Komunitas Hijau

Komunitas hijau atau *green community* adalah program pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat dalam hidup bersih dan sehat serta perbaikan kondisi lingkungan tempat tinggal. Program ini dilakukan di daerah miskin dan membutuhkan perhatian berupa pendampingan kesehatan lingkungan.

5) PROSPEK

Program Sinergi Pemberdayaan Komunitas (PROSPEK) merupakan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam program ini adalah kelompok petani gurem, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan. Masyarakat dihimpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan rutin. KSM, kemudian dihimpun dalam koperasi yang dikelola oleh, dari dan untuk anggota.

6) Program Sekolah Berbasis Komunitas (SBK)

Sekolah berbasis komunitas dan kearifan lokal. Dilaksanakan untuk melengkapi pendidikan formal yang ada sehingga peserta didik diharapkan memiliki motivasi, pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan daerahnya.

7) Voucher Yatim

Voucher Yatim Merupakan program filantropi dalam bentuk voucher belanja untuk anak-anak yatim sehingga mereka dapat memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus keinginan mereka (Dokumentasi PKPU Jawa Tengah).

3.1.4. Struktur Organisasi PKPU Jawa Tengah

Organisasi PKPU Jawa Tengah saat ini dikendalikan oleh struktur yang di dalamnya terdapat unsur Direktur dan tiga bidang, yaitu: bidang keuangan membawahi divisi administrasi, akuntansi dan kasir. Bidang penghimpunan membawahi divisi zakat promotion, divisi retail yang terdiri dari zakat center, customor relation, tabung peduli dan zakat advisor, selanjutnya divisi corporate dan CSR Management, serta divisi marketing support. Bidang pendayagunaan membawahi divisi support dan layanan *mustahiq*, serta devisi kesehatan, divisi pendidikan dan divisi ekonomi. Di samping itu, PKPU didukung pula dengan relawan yang cepat dalam kerja serta tanggap dalam merespon tuntutan lapangan, relawan biasanya dari kalangan mahasiswa. Adapun susunan kepengurusan PKPU Jawa Tengah tahun 2011, sebagai berikut:

Direktur : Haryono, SE

Bidang Keuangan

Kabid : Azizah Rini S, SE

Administrasi : Priyanto, Amd

Akuntansi : Rizki Diah Safitri, SE

Kasir : Nur Ratna Dewi

Bidang Penghimpunan

Kabid	: Fatieh Abdul Azies, S.Sos
Marketing Support	: Bagus Pandu Wicaksana, SS
Zakat Promotion	: Ujjanti
Corporate dan CSR Management	: Djoko Adhi Saputro, S.Pd
Retail	
- Zakat center	: Tri Murdati, Amd
- Customor Relation	: Rizki Muliani dan Nurudin
- Tabung Peduli	: Retno Widowati, SE
- Zakat Advisor	: Bety Yanitasari, SE

Bidang Pendayagunaan

Kabid	: M. Miftahul Surur, S.Pd
Kesehatan	: Didik Husada, SKM
Pendidikan	: M. Subhanuddin Nashrullah
Support dan Layanan Mustahik	: Musyafa, SS
Ekonomi	: Supriyadi, SE

3.2. Pengelolaan ZIS pada PKPU Jawa Tengah

3.2.1. Proses pengumpulan Dana Zakat pada PKPU Jawa Tengah

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka tiap pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar benar-benar amanah, jujur, terampil, professional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengabdian sebagai pengurus (Amil) pada BAZ maupun LAZ. Oleh karenanya diharapkan para pengelolaan zakat baik BAZ maupun LAZ dari tingkat Nasional sampai dengan Kecamatan harus

mampu merubah kehidupan umat yang tadinya sebagai penerima zakat (*Mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*Muzakki*).

Dengan demikian cara-cara mengelola zakat tradisional seperti *muzakki* langsung menyerahkan dan membagikan kepada *mustahiq* dan tindakan ini kurang mencapai tujuan. Zakat hendaknya dikumpulkan dan didayagunakan lewat BAZ dan LAZ dengan memperhatikan kondisi penerima zakat untuk menghindari kemiskinan berkepanjangan.

Zakat sebagai sumber dana umat Islam diharapkan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial serta meningkatkan kualitas hidup kaum dhu'afa. Sumber dana PKPU Jawa Tengah berasal dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai tujuan.

Dalam penggalangan dana PKPU Jawa Tengah menerapkan konsep dan teori marketing. Menurut Fatieh Abdul Azies (wawancara tanggal 26 Oktober 2011), penggalangan pada dasarnya sama dengan menjual produk. PKPU dalam hal ini, menjual program dan produk syari'ah. Produk yang dijual dalam bentuk program seperti program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, dan program penanggulangan gawat darurat. Untuk menarik perhatian program-program PKPU diberi nama yang cukup baik, seperti yang telah disebutkan diantaranya PROSMILING (Program Kesehatan Masyarakat Keliling), BUDARZI (Ibu Sadar Gizi), PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi) dan sebagainya.

Kelompok sasaran yang dibidik PKPU untuk menjadi target *muzakki* saat ini adalah perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN dan perusahaan swasta. Target ini dibidik oleh PKPU karena secara resmi BUMN memiliki kewajiban untuk menyumbang dana bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta, lebih sebagai kewajiban moral. Cara-cara yang ditempuh oleh PKPU untuk memasarkan produk syariahnya ke perusahaan-perusahaan adalah langsung mendatangi manajemen perusahaan, melalui badan dakwah Islam perusahaan, majelis taklim atau individu-individu kunci di perusahaaperusahaan tertentu (Wawancara dengan Haryono tanggal 26 Oktober 2011).

Untuk memudahkan layanan dalam pengumpulan dana PKPU Jawa Tengah, strategi yang digunakan yaitu: pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), kerjasama program CSR, donasi retail dana kemanusiaan, pembayaran lewat konter layanan ZIS, melalui mitra PKPU, melalui bank: ATM (transfer, phone dan internet banking), layanan jemput zakat, layanan donasi lewat sms, dan pendaftaran on-line). Adapun kebijakan PKPU dalam pengumpulan dana yaitu bahwa jenis dana yang dihimpun berupa zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dana sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) CSR, dan dana hibah (Wawancara dengan Haryono tanggal 26 Oktober 2011).

Proses pengumpulan dana yang dilakukan PKPU Jawa Tengah melalui tiga hal, yaitu:

- 1) *Customer Relationship Management (CRM)*. Kegiatan CRM ada dua yaitu *contact center* dan *customer process*. *Contact center* adalah salah satu bagian yang melakukan hubungan langsung dengan para *muzakki*. Sedangkan *customer process* melakukan kegiatan penjangkaran *muzakki* sampai pencatatan menjadi donasi.
- 2) *Retail* meliputi tiga bagian, yaitu:
 - a. *Direct Channel* yaitu penggalangan dana secara langsung. Dalam hal ini ada beberapa bagian, yaitu:

Pertama, kelompok donatur. Langkah-langkah sampai pada kelompok donatur ada beberapa macam metode atau strategi yaitu: *Strategi direct mail* (penggalangan dana lewa surat); mengumpulkan nama dan alamat yang dikumpulkan dari perusahaan atau asosiasi bisnis dan organisasi nirlaba; *media campaign* (penggalangan dana lewat kampanye di media); *membership* (merekrut donatur menjadi anggota lembaga atau participant program) atau *special event* (event khusus).

Kedua, counter. PKPU membuka counter sebagai tempat layanan *muzakki*. Ketiga, membuka gerai. Keempat, melakukan sosialisasi ke bank dan kelima melakukan pengajian di perusahaan-perusahaan.
 - b. *Partnership Channel*, yaitu melakukan kerjasama dengan masjid yang berada di perumahan-perumahan atau perkantoran.

- c. *Marketing Communication* (promosi). Promosi yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: *Above the line* yaitu promosi lewat media elektronik seperti radio atau televisi dan *below the line* yaitu promosi lewat media cetak seperti brosur dan spanduk.
- 3) *Corporate*, yaitu menggalang dana zakat perusahaan. Dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan, PKPU Jawa Tengah menawarkan beberapa bentuk, yaitu:
- a. Menawarkan program sosial seperti beasiswa atau bantuan sosial. Dana kegiatan dibiayai dari dana ZIS yang terkumpul dari perusahaan tersebut.
 - b. Program pendukung dimana perusahaan menyerahkan sejumlah dana untuk mendukung sebuah program PKPU Jawa Tengah, seperti program beasiswa dan program sosial (Wawancara dengan Fatieh Abdul Azies tanggal 26 Oktober 2011).

3.2.2. Proses Pendayagunaan Dana Zakat pada PKPU Jawa Tengah

Pada bab V Undang-Undang No. 38 tahun 1999 mengenai pendayagunaan zakat, yaitu pasal 16, dikatakan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan sesuai dengan ketentuan agama. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Ini artinya penyaluran zakat haruslah dilakukan pada pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana dimuat dalam al-Qur'an surat at-

Taubah ayat 60 yaitu; fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab* (merupakan santunan yang diberikan untuk membebaskan mustahiq zakat dari belenggu kesulitan hidup seperti membebaskan petani, pedagang dan nelayan kecil dari jeratan pinjaman atau rentenir), *gharimin* (orang-orang atau lembaga-lembaga Islam yang jatuh pailit atau mempunyai tanggungan hutang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang baik dan sah menurut hukum), *fisabilillah* (orang yang sedang menempuh tujuan tertentu yang diridhoi Allah tetapi dalam kesulitan seperti pelajar dan da'i), *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya diantaranya pelajar yang kekurangan biaya) (Muhammad Daud Ali, 1988: 68).

PKPU Jawa Tengah memiliki kebijakan dalam hal penyaluran dana ZIS untuk *mustahiq*. PKPU Jawa Tengah mengelompokkan delapan *ashnaf* yang disebut dalam al-Qur'an menjadi dua kategori. Empat *ashnaf* pertama merupakan *ashnaf* yang bersifat darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat *ashnaf* berikutnya. Dari keempat *ashnaf* pertama yang diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin seringkali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non-Muslim (Wawancara dengan Haryono tanggal 26 Oktober 2011).

Penyaluran dana zakat pada PKPU Jawa Tengah dilakukan dengan membagi penggunaan dana menjadi empat bagian, yaitu:

1) Penggunaan Berdasarkan Program.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, PKPU Jawa Tengah mempunyai program unggulan yaitu Program CBDRM (*Community Based Disaster Risk Management*), Program Ibu Sadar Glzl (BUDARZI), PROSMILING, Program Komunitas Hijau, PROSPEK, Program Sekolah Berbasis Komunitas (SBK), dan Voucher Yatim. Bidang Pendayagunaan membuat proposal penggunaan dana yang diberikan kepada direktur/Kepala Cabang untuk diverifikasi bersama Bidang Keuangan untuk pertimbangan anggaran dan selanjutnya memperoleh otorisasi. Kemudian Bidang Keuangan membuat DPU (Daftar Penggunaan Uang) yang nanti akan dilaporkan ke kasir. Kasir kemudian menerima DPU dan mencatatnya dalam BPY (Bukti Pembayaran) 3 rangkap. Setelah menerima uang dari kasir, Bidang Pendayagunaan mulai mendistribusikan dana ZIS sesuai dengan proposal yang diajukan. Bidang pendayagunaan kemudian membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) rangkap 2 yang diberikan kepada Direktur/Kepala Cabang dan arsip Bidang Pendayagunaan, dan Direktur/Kepala Cabang melakukan verifikasi kelebihan atau kekurangan dana, LPD kemudian dicek ulang oleh kasir, apabila kelebihan dana, maka sisanya dikembalikan kepada kasir dengan membuat Bukti Penerimaan (BPN) rangkap 3, yaitu untuk kasir, Bidang III dan bagian akuntansi. Jika ternyata terdapat kekurangan dana, maka kasir akan menggantinya dan membuat BPY rangkap 3. Bagian

akuntansi kemudian mencatat penerimaan atau pengeluaran tersebut kedalam jurnal dan buku besar.

2) Penggunaan Berdasarkan Permohonan.

Dana ini diberikan bagi para pemohon bantuan yang mengajukan proposal kepada PKPU Jateng. Apabila permohonan kurang dari Rp 1.000.000 Bidang Keuangan beserta Bidang Pendayagunaan melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan apakah layak atau tidak. Kemudian membuat Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap 2 untuk kasir dan sebagai arsip Bidang Pendayagunaan. Kasir kemudian memberikan dana uang kepada Bidang Pendayagunaan dan mencatatnya dalam BPY rangkap 3 yaitu untuk pemohon, bagian akuntansi dan sebagai arsip.

Apabila permohonan bantuan lebih dari Rp 1.000.000 Bidang Pendayagunaan yang telah melakukan verifikasi bersama Bidang Keuangan mengajukan proposal tersebut kepada Direktur untuk dilakukan otorisasi. Bidang Pendayagunaan kemudian membuat SPM rangkap 2 untuk kasir dan arsip. Berdasarkan SPM tersebut, kasir mencatat dalam BPY rangkap 3 untuk pemohon, bagian akuntansi dan arsip. Bagian akuntansi mencatat pengeluaran dana pemohon kedalam jurnal dan buku besar.

3) Pengguna Untuk Kegiatan Operasional

Pos ini diadakan untuk mengantisipasi penggunaan dana zakat (khususnya bagi Amil) yang terlalu besar. Tiap-tiap Bidang membuat

Daftar Kebutuhan dan setelah memperoleh persetujuan dari Direktur daftar ini diberikan kepada kasir. Kasir kemudian mencatatnya dalam BPY rangkap 3 yaitu untuk Bidang yang membutuhkan, bagian akuntansi dan arsip. Bagian akuntansi mencatat BPY kedalam jurnal dan buku besar.

4) Penggunaan Untuk Penggajian

Bagian Personalia mencatat jam hadir karyawan pada Buku Jam Hadir (BJH) termasuk didalamnya aktivitas diluar kantor dalam rangka menjalankan tugas lembaga. Daftar ini kemudian diberikan kepada administrasi dan membuat Daftar Gaji per-orang (DG) dan Rekapitulasi Daftar Gaji keseluruhan (RDG) masing-masing rangkap 2 untuk selanjutnya dimintakan otorisasi kepada Direktur, dan diserahkan kepada kasir dan kasir membuat Bukti Pembayaran (BPY) dan Lembar Rincian Gaji (LRG) rangkap 3 untuk penerima (karyawan), bagian akuntansi dan Arsip. BPY, LRG dan RDG kemudian digunakan bagian akuntansi sebagai bahan untuk membuat Jurnal dan Buku Besar (Wawancara dengan Azizah Rini S dan Priyono tanggal 26 Oktober 2011).

Dalam penyaluran dana ZIS, PKPU Jawa Tengah memiliki beberapa program. Program tersebut secara garis besar terdiri atas empat bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan gawat darurat. Dari keempat bidang program ini, PKPU Jawa Tengah telah melakukan berbagai macam kegiatan penyaluran dana ZIS.

a. Pendidikan

Untuk program dibidang pendidikan diberikan beasiswa dan ketrampilan, seperti disediakan kelas pelatihan ketrampilan (pemuda pengangguran) seperti pelatihan menjahit tas di Kudus dan pelatihan teknisi HP di Semarang dan Jepara; bimbingan belajar (siswa-siswi SD, SMP, SMA dhu'afa); beasiswa produktif (mahasiswa dhu'afa yang produktif); beasiswa terpadu (siswa-siswi SD, SMP, SMA dhu'afa), serta sekolah gratis TK An-Nur (anak dhu'afa) yang didirikan PKPU di kota Surakarta sejak tahun 2003 dan pemberdayaan anak jalanan dan orang tuanya (Dokumentasi PKPU dan wawancara dengan Haryono tanggal 26 Oktober 2011). Pemberian beasiswa melalui dua cara yaitu pemberian langsung setelah dilakukan survey dan menjalin kemitraan dengan lembaga lain seperti dengan BAZ kota Semarang. Selain beasiswa juga mendirikan sekolah-sekolah alternatif termasuk di daerah bencana seperti bencana erupsi di Magelang dan Banjarnegara (Wawancara dengan M. Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011).

b. Kesehatan

Untuk program dibidang kesehatan disediakan ambulan keliling dan pengobatan gratis dengan nama PROSMILING (Program Kesehatan Masyarakat Keliling) untuk komunitas miskin yang jauh dari fasilitas kesehatan, kegiatan yang pernah dilakukan yaitu pengobatan gratis dan pendirian klinik bagi warga kumuh bantaran sungai di Sarirejo Semarang Timur dan pengungsi erupsi di Magelang dan

Banjarnegara. Kemudian dari program bidang kesehatan disediakan juga program layanan antar jenazah gratis, klinik bersalin (dhu'afa dan khalayak umum), serta program BUDARZI (Ibu Sadar Gizi) dan komunitas hijau (komunitas dengan sanitasi kurang baik) (Wawancara dengan Haryono tanggal 26 Oktober 2011).

c. Ekonomi

Program ekonomi atau PROSPEK (Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi). Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok masyarakat. Di antaranya yaitu, membentuk kelompok swadaya masyarakat dan mengadakan pelatihan kewirausahaan. Sasarannya yaitu masyarakat golongan ekonomi lemah agar dapat memiliki usaha sendiri, seperti pedagang kecil, *home industry*, petani, peternak, nelayan, tukang ojek, tukang sapu serta buruh. Kemudian program pemberdayaan ekonomi yang pernah dilakukan diantaranya yaitu pemberdayaan masyarakat korban bencana Merapi di Magelang dengan memperbaiki kolam/empang yang terbengkalai menyusul terjadinya erupsi Merapi bulan Oktober 2010 dan mengadakan 80 ribu bibit lele dengan membentuk kelompok KSM yang terdiri dari 14 anggota (Wawancara dengan Haryono tanggal 26 Oktober 2011).

d. Gawat darurat (*rescue*)

Program gawat darurat (*rescue*) yaitu dengan kegiatan tanggap bencana atau CBDRM (*Cummunity Based Disaster Risk Management*),

serta mengadakan latihan tim relawan lintas kabupaten/kota. Adapun kegiatan yang pernah dilakukan yaitu pemberian bantuan kesehatan, bantuan sembako dan pakaian layak pakai bagi masyarakat korban bencana, serta membuka dapur umum di daerah bencana seperti di Magelang dan Banjarnegara. Selain itu juga PKPU mengadakan rehabilitas fasilitas ibadah dan rumah korban gempa dan erupsi di Magelang dan Banjarnegara, serta pembinaan mental spiritual pengungsi (Wawancara dengan Haryono tanggal 26 Oktober 2011).

Penyaluran dana selain keempat bidang di atas, PKPU juga menyalurkan dana dalam bentuk santunan kepada anak yatim berupa voucher yatim yang merupakan salah satu dari tujuh program unggulan PKPU Jawa Tengah. Voucher yatim merupakan program filantropi dalam bentuk voucher belanja untuk anak-anak yatim sehingga mereka dapat memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus keinginan mereka. Kegiatan ini pernah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2011, yaitu dengan belanja bareng 3333 yatim serentak di 23 lokasi di Indonesia, di Jawa Tengah kegiatan BBY (Belanja Bareng Yatim) telah diikuti oleh 730 anak yang diselenggarakan di kota Tegal (100), Kudus (200), Karanganyar (100), Purwokerto (130), Boyolali (100) dan di Semarang sendiri dilaksanakan di Carrefour Sronдол Banyumanik dengan peserta 100 yatim, setiap anak yatim diberikan voucher belanja sebesar Rp. 150.000 (Wawancara dengan Haryono tanggal 26 Oktober 2011).

Dalam mengalokasikan anggaran, PKPU Jawa Tengah mempunyai kebijakan umum untuk program pendayagunaan. Untuk program pendayagunaan PKPU Jawa Tengah mengalokasikan dana 70% dari total dana yang diperoleh. Pada tahun 2010 dana yang terkumpul sekitar Rp 3,5 milyar, dengan alokasi pendayagunaan (70%) Rp 2,450 milyar. Sedangkan pada tahun 2011 PKPU Jawa Tengah mengumpulkan dana sekitar Rp 4,5 milyar, dan alokasi pendayagunaan (70%) Rp 3,150 milyar. Adapun alokasi anggaran program pendayagunaan dari tahun 2010 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Alokasi anggaran program PKPU Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011

Alokasi	Persentase		Besaran Alokasi (Rp)	
	2010	2011	2010	2011
Pemberdayaan	75%	80%	1.837.500.000	2.520.000.000
Charity	25%	20%	612.500.000	630.000.000
Pemberdayaan, prioritas alokasi penganggaran				
Alokasi	Persentase		Besaran Alokasi (Rp)	
	2010	2011	2010	2011
Prospek	30%	15%	551.250.000	378.000.000
BUDARZI	20%	15%	367.500.000	378.000.000
SBK	20%	15%	367.500.000	378.000.000
Komunitas Hijau	15%	15%	275.625.000	378.000.000
CBDRM	15%	5%	275.625.000	126.000.000
Qurban	-	35%	-	882.000.000
Jumlah			1.837.500.000	2.520.000.000

Charity, prioritas penganggaran				
Alokasi	Persentase		Besaran Alokasi (Rp)	
	2010	2011	2010	2011
Penanggulangan Bencana	50%	45%	306.250.000	283.500.000
Prosmiling	30%	10%	183.750.000	63.000.000
Voucher Yatim	20%	15%	122.500.000	94.000.000
Ramadhan	-	30%	-	189.000.000
Jumlah			612.500.000	630.000.000

Sumber: Dokumentasi PKPU Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011

Berdasarkan data di atas, penyaluran dana PKPU Jawa Tengah untuk masing-masing program dilihat dari persentasenya pada tahun 2010 lebih besar daripada tahun 2011. Program terbesar pada tahun 2010 yaitu *rescue* (penanggulangan bencana, CBDRM), PROSMILING dan Prospek. Hal itu karena adanya bencana alam seperti banjir di Mangkang, gempa dan erupsi Merapi di Magelang. Sehingga dana yang disalurkan diprioritaskan untuk program yang bersifat kemanusiaan dan perlu penanganan cepat (Wawancara dengan M.Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011).

Dari pengalaman, PKPU memiliki keunggulan untuk mendistribusikan dana dalam program yang sifatnya perlu penanganan cepat, seperti peristiwa gempa, banjir dan sebagainya. Selain itu, dalam penanganan bencana alam PKPU melaksanakan program lebih lanjut

dalam bentuk rehabilitas dan pembangunan komunitas (Wawancara dengan M.Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011).

Dalam menyalurkan dana, lembaga PKPU Jawa Tengah taat kepada peruntukan yang diniatkan oleh mereka yang memberi. Dana semacam ini diistilahkan sebagai dana terikat. Jika pemberi (*muzakki*) menyatakan bahwa dana yang ia berikan untuk diserahkan kepada korban bencana misalnya, PKPU akan menyampaikan sesuai dengan yang diamanatkan. Demikian halnya dengan wakaf. Apabila *wakif* menyerahkan harta wakaf untuk keperluan mobil ambulans, PKPU akan menyalurkan sesuai dengan permintaan. Seandainya *muzakki* atau *wakif* menyerahkan ZIS atau harta wakafnya kepada PKPU tanpa tujuan tertentu lembaga ini pada umumnya mendistribusikannya untuk pemberdayaan masyarakat terutama pemberdayaan ekonomi (Wawancara dengan Haryono tanggal 26 Oktober 2011).

3.3. Perubahan Status Mustahiq Menjadi Muzakki yang dilakukan PKPU Jawa Tengah

3.3.1. Kriteria Mustahiq

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. PKPU dalam menyalurkan dana zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq*. PKPU memprioritaskan fakir miskin dan yang bersifat perlu penanganan cepat (darurat), seperti peristiwa bencana alam.

PKPU menggolongkan *mustahiq* zakat menjadi dua kelompok, yaitu; *pertama*, *mustahiq* karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan;

kedua, mustahiq karena kemaslahatan umat Islam. Golongan yang masuk dalam kategori pertama dapat dibedakan pada dua hal, yaitu: (1). Ketidakmampuan di bidang ekonomi, misalnya: fakir miskin, *gharim* dan *ibnu sabil* (pelajar yang kesulitan biaya dan melancarkan pendidikan atau pemeliharaan anak yatim); (2). Ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, misalnya *riqab*. *Riqab* dalam konteks saat ini yaitu orang-orang yang terbelenggu kesulitan hidup yang membutuhkan dana cukup besar seperti biaya yang berkaitan dengan pengobatan insidentil dan orang-orang yang terbelenggu dari jeratan pinjaman atau rentenir.

Golongan yang termasuk dalam kategori kedua, mendapatkan harta zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam. Yang masuk dalam kelompok ini adalah amil dan *fisabilillah*. Amil mendapatkan harta zakat karena telah melakukan tugasnya sebagai pengelola zakat. *Fisabilillah*, mendapatkan dana zakat karena semua kegiatan yang dilakukan bermuara pada kemaslahatan umat Islam pada umumnya.

Pemberian zakat kepada para *mustahiq* dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu *mustahiq* konsumtif, *mustahiq* produktif dan *mustahiq* untuk peningkatan kapasitas.

- a. *Mustahiq* konsumtif yaitu *mustahiq* yang diberi dana zakat, infaq dan shodaqoh untuk kebutuhan-kebutuhan konsumsi atau kebutuhan sekali habis. Barang-barang konsumsi ini, berupa Sembilan bahan pokok

(sembako), air bersih, obat-obatan, pakaian baru dan lama layak pakai, serta pembenahan rumah (bedah rumah). Sasarannya terutama di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, wilayah yang terkena bencana alam, panti asuhan yatim piatu secara langsung, cepat dan tepat setelah melalui proses penilaian secara cermat.

- b. *Mustahiq* produktif yaitu *mustahiq* yang diberi dana zakat, infaq dan shodaqoh dalam bentuk pemberdayaan. *Mustahiq* produktif ini antara lain; pedagang kecil, petani kecil, peternak, pengrajin, nelayan, buruh dan lain-lain.
- c. *Mustahiq* untuk peningkatan kapasitas adalah *mustahiq* yang diberi untuk maningkatkan kemampuan, misalnya melalui beasiswa sekolah bagi anak-anak miskin dan pemberian uang saku (*bisyaroh*) untuk guru sekolah atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan (Wawancara dengan M. Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011).

3.3.2. Kriteria Muzakki

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim dan mampu berdasarkan syariat Islam untuk menunaikan zakat. Zakat diwajibkan bagi para *aghniya* yang kekayaannya memenuhi batas minimal untuk setahun dan harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

Dari data yang diperoleh, bahwa dana yang dihimpun oleh PKPU Jawa Tengah selain dari *muzakki*, juga berasal dari *mushoddiq* dan *munfiq*.

Istilah *muzakki*, *mushoddiq* dan *munfiq* penulis menyebutnya dengan nama donatur. Donatur atau pembayar zakat, infaq dan shodaqoh pada PKPU Jawa Tengah dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu donatur tetap dan donatur tidak tetap. Donatur tetap adalah donatur yang sudah terdaftar menjadi pembayar zakat, infaq dan shodaqoh pada PKPU. Dengan kata lain, donatur ini selalu membayar zakat, infaq dan shodaqoh pada PKPU Jawa Tengah. Sedangkan donatur tidak tetap adalah donatur yang tidak terdaftar dan donatur ini tidak selalu membayar zakat, infaq dan shodaqoh pada PKPU Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa *Muzakki* pada PKPU Jawa Tengah berasal dari PNS, pegawai swasta dan wirausaha. Sedangkan *mushoddiq* dan *munfiq* selain dari PNS, pegawai swasta dan wirausaha juga berasal dari para pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA dan Mahasiswa, yaitu dengan memberikan tabung peduli (kencleng) kepada setiap pelajar dari SD, SMP, SMA dan Mahasiswa yang sebelumnya sudah bekerjasama dengan pihak Sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan (Wawancara dengan M.Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011).

Adapun penerimaan dana dari *muzakki*, *munfiq* dan *mushoddiq* pada PKPU Jawa Tengah tahun 2010 dan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Penerimaan ZIS PKPU Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011

No	Donatur	Persentase		Perolehan Dana	
		2010	2011	2010	2011
1.	Muzakki	35%	38%	1.225.000.000	1.710.000.000
2.	Munfiq/ Mushoddiq	65%	62%	2.275.000.000	2.790.000.000
Total		100%	100%	3.500.000.000	4.500.000.000

Sumber: Dokumentasi PKPU Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011

Berdasarkan data di atas, perolehan dana dari *munfiq* dan *mushoddiq* pada tahun 2010 dan 2011 lebih besar daripada penerimaan *muzakki*. Hal ini terkait adanya bencana seperti gempa dan erupsi di Magelang dan bencana erupsi di Banjarnegara. Sehingga donatur banyak memberikan dana pada PKPU Jawa Tengah berupa infaq dan shodaqoh untuk penanggulangan bencana tersebut. Adapun untuk dana zakat disalurkan kepada delapan ashnaf diantaranya dalam bentuk santunan, pemberian beasiswa dan pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Sedangkan untuk dana infaq dan shodaqoh PKPU Jawa Tengah menyalurkan kepada *mustahiq* diantaranya untuk penanganan bencana seperti pengadaan latihan tim relawan, rehabilitas fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan dan rumah korban bencana, serta untuk pelayanan kesehatan seperti penyediaan ambulan keliling, pengobatan gratis dan pendirian klinik.

3.3.3. Proses Mengubah Status *Mustahiq* Menjadi *Muzakki*

Dalam proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Bentuk usaha kelompok dalam pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh yang cukup banyak (*multiple effect*), karena tanggung jawab dalam usaha dilakukan bersama-sama. Misalnya usaha kelompok pembuatan kue dari bahan dasar ketela pohon di Pundak Payung Banyumanik yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga dari kalangan keluarga kurang mampu. Dalam usaha kelompok ini PKPU Jawa Tengah memberikan modal dan pendampingan hingga dapat terus berkembang menjadi unit bisnis yang lebih besar. Efek dari usaha bersama banyak yang diperoleh, antara lain: meringankan beban, saling bertukar pikiran, dan menjalin persaudaraan (*ukhuwwah/brotherhood*) di antara peserta program. Hal penting lain dari usaha bersama tersebut dapat melahirkan suatu pemerataan kepemilikan di antara anggota dan menggambarkan demokratisasi ekonomi. Jurang ketimpangan sosial dapat dipersempit karena adanya kebersamaan dan persaudaraan.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pendidikan bagi masyarakat dalam membentuk pribadi yang mandiri. Karena, kemandirian dapat merupakan kunci utama yang mendorong terwujudnya perubahan dalam individu. Dengan kemandirian, mereka juga tidak tergantung kepada orang lain, sehingga dapat berusaha mengatasi

persoalan yang dihadapi. Selain kemandirian, program pemberdayaan yang dilakukan secara berkelompok memberikan pelajaran untuk kerjasama dalam upaya memecahkan persoalan yang dihadapi sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah.

Proses pelaksanaan perubahan *mustahiq* menjadi *muzakki* melalui program KSM ini, dilaksanakan PKPU melalui empat tahapan. Tahapan *pertama* adalah persiapan yaitu melakukan pendataan dan survey, serta sosialisasi pembentukan kelompok. Tahapan *kedua* adalah mengadakan *screening* (penyaringan) dan akad, serta pemberian modal. Tahap *ketiga* adalah propagasi atau pembinaan, PKPU melakukan pendampingan kepada kelompok KSM hingga dapat terus berkembang menjadi unit bisnis yang lebih besar. Selanjutnya tahapan *keempat* adalah terminasi atau kemandirian. Pada tahapan ini unit bisnis dari KSM tersebut harapannya akan lebih mandiri sehingga menjadi koperasi sekunder, sedangkan PKPU hanya bertugas sebagai pendamping dan pengawas saja (Wawancara dengan M. Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011).

Dana bergulir yang diberikan kepada tiap-tiap KSM sifatnya *qardhul hasan* (pinjaman), karena selama ini di PKPU belum ada model pembiayaan yang bekerja sama dengan BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*). Setiap KSM mendapatkan bantuan dana bervariasi sesuai dengan jumlah anggota per KSM dan satu KSM biasanya terdiri dari 5-20 orang. Pembagian pada anggota diserahkan pada musyawarah kelompok tersebut, namun setiap anggota kelompok yang ingin menggunakan dana produktif

untuk mengembangkan usahanya rata-rata mendapatkan sekitar Rp 1 juta per orang. Program pemberdayaan melalui KSM ini juga diperkuat dengan pendampingan. Adapun syarat untuk menjadi anggota kelompok KSM adalah WNI, muslim, termasuk golongan delapan *ashnaf* diprioritaskan fakir miskin, masih produktif dan memiliki usaha (apabila belum punya usaha minimal sudah memiliki rencana usaha). Selain itu peserta harus mengisi formulir, melampirkan fotocopi KTP dan fotocopi Kartu Keluarga (KK) (Wawancara dengan M.Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011).

Setelah memenuhi syarat, para peserta program KSM mengikuti acara sosialisasi di dalam acara tersebut disampaikan mengenai program dan prosedur serta dialog dengan para pengurus. Para peserta selanjutnya diharuskan mengikuti *screening*. *Screening* (penyaringan) dilakukan selama 3 hari berturut-turut dengan tempat dan waktu yang disepakati bersama saat sosialisasi. Pada *screening* (penyaringan) tersebut dibahas pula mengenai keanggotaan, kedisiplinan, kewajiban anggota, pembagian kelompok, struktur dan penamaan KSM untuk selanjutnya diresmikan dengan syarat semua anggota hadir serta akad pemberian modal. Jika ada salah seorang anggota tidak hadir, maka peresmian ditunda hingga jumlah anggota lengkap (Wawancara dengan M.Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011).

Dalam penentuan anggota KSM diadakan survey dan wawancara di samping harus mengisi formulir yang disediakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif terkait dengan masalah keuangan. Melalui survey

dapat diketahui kemampuan para calon program KSM dalam mengelola keuangan. Survey juga dilakukan untuk mengetahui kebenaran identitas calon yang termasuk kategori *mustahiq* zakat. Termasuk di dalamnya kondisi rumah dan tingkat ekonominya.

Untuk memudahkan para anggota, pada saat pelaksanaan program, maka dilakukan pendampingan. Pendampingan diadakan selama satu bulan sekali tiap minggu pertama secara intensif di tempat yang ditentukan. Biasanya pertemuan dilakukan di rumah anggota, kantor RW atau berdasarkan musyawarah anggota, bisa tetap bisa bergilir. Aspek pendampingan mencakup perubahan karakter, pola pikir, wawasan keilmuan anggota. Anggota diharuskan memiliki tabungan berencana sebelum pembiayaan dana bergilir.

Dalam mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah ada dua keterangan (status), yaitu KSM yang masih dalam pendampingan, dan sudah mandiri. Dari tahun 2004 sampai tahun 2011 PKPU Jawa Tengah telah membentuk 20 KSM dengan 404 anggota, 14 KSM masih dalam pendampingan dan 6 KSM sudah mandiri. Untuk daftar KSM yang masih dalam pendampingan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4

Daftar KSM PKPU Jawa Tengah masih dalam pendampingan

No	Nama KSM	Tanggal berdiri	Alamat KSM	Jumlah Anggota
1.	Mina Mulya (perikanan)	2 Maret 2011	Kec. Dukun Magelang	14 orang
2.	Al-Fatah (komunitas pengajar TPQ)	10 Maret 2011	Ngaliyan Semarang	20 orang
3.	Maju Bersama (Ortu Anak Jalanan)	7 Januari 2008	Seroja Semarang Selatan	14 orang
4.	Bahagia (Tukang Sapu Jalanan)	7 Januari 2004	Sumur boto Tembalang Semarang	22 orang
5.	Barokah Indonesia Power (nelayan)	19 Februari 2010	Tambak Mulyo Semarang Timur Semarang	17 orang
6.	Sejahtera FE Undip (pedagang kaki lima)	12 Agustus 2009	Jl Imam Bonjol Semarang Selatan	15 orang
7.	Ternak Ayam Tubanan PLTU Jepara	12 Januari 2010	Tubanan Bangsri Jepara	60 orang
8.	Ternak Ayam Bondo PLTU Jepara	12 Januari 2010	Bondo Bangsri Jepara	20 orang
9.	Ternak Ayam Kaliaman PLTU Jepara	12 Januari 2010	Kaliaman Bangsri Jepara	40 orang
10.	Amanah Indonesia Power	12 Juni 2010	Pudak Payung RT 3 RW 6 Banyumanik	11 orang
11.	Sendang Mulyo Telkomsel	22 Januari 2009	BTS Wonodri Sendang Semarang Selatan	15 orang
12.	Mutmainah Mandiri	31 Mei 2010	Bangetayu Wetan Pedurungan Semarang	14 orang

13.	Assolihah Mandiri (pembuatan kue dari singkong)	31 Mei 2010	Puskopkar Pudak Payung Banyumanik	13 orang
14.	Seluler Bina Mandiri Telkomsel	16 April 2010	Barusari raya Semarang Selatan	10 orang

Sumber: Dokumentasi PKPU Jawa Tengah tahun 2011.

Setelah PKPU Jawa Tengah membentuk KSM dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di atas, maka PKPU Jawa Tengah melakukan pendampingan. Dalam pendampingan dilakukan bertahap. Untuk pemula pendampingan berupa motivasi dalam upaya memperkuat keinginan anggota untuk aktif dalam program. Sedangkan pada kelompok yang sudah mandiri pendampingan diberikan dengan materi keuangan (Wawancara dengan M.Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011). Untuk daftar KSM yang sudah mandiri dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5

Daftar KSM PKPU Jawa Tengah yang sudah mandiri

No	Nama KSM	Tanggal berdiri	Alamat KSM	Jumlah Anggota
1.	Rukun Makmur Klaten	25 Februari 2008	Kebondalem Kidul Prambanan Klaten	6 orang
2.	Sumber Usodo (Tukang Jamu)	23 Maret 2007	Wonolopo Mijen Semarang	40 orang
3.	Al Ikhlas Telkomsel	23 Desember 2008	BTS Kramas Tembalang Semarang	13 orang
4.	Surya Pareng Telkomsel	10 September 2008	Pengarengan Pangenan Cirebon	20 orang

5.	Maju Jaya Telkomsel	20 September 2008	JL KH Ahmad Dahlan Tirto Pekalongan	20 orang
6.	Ikhtiar Telkomsel (telor asin)	25 September 2008	krandon Margadana Tegal	20 orang

Sumber: Dokumentasi PKPU Jawa Tengah tahun 2011.

Contoh proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* melalui program KSM yang dilakukan PKPU Jawa Tengah yaitu dengan memberikan bantuan langsung kepada pekerja tukang sapu di daerah Sumurboto Tembalang Semarang dengan nama “KSM Tukang Sapu Bahagia”, awal berdiri tahun 2004 dengan jumlah 14 anggota, sampai tahun 2011 ada penambahan anggota menjadi 22 anggota. Mereka diberikan bantuan modal secara kelompok dan dibina sesuai dengan keahlian masing-masing. Setiap anggota diberikan modal sebesar Rp 400.000 dengan mengembalikan Rp 15.000 perbulan dan peserta juga diharuskan memiliki tabungan. Bantuan modal ini diberikan untuk usaha sampingan setelah selesai bekerja sebagai tukang sapu, usaha tersebut seperti berjualan bensin, membuka warung kelontong, usaha kredit pakaian, berjualan gorengan dan berjualan rokok dan tembakau. Pemberian bantuan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kondisi masyarakat khususnya pekerja tukang sapu yang menanggung beratnya beban ekonomi yang semakin mahal. Sedangkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tukang sapu sebesar Rp 150.000 perbulan. Kalau dilihat dari kebutuhan ekonomi yang semakin mahal dengan penghasilan

Rp 150.000 perbulan masih jauh dari mencukupi kebutuhan sehari-hari (Wawancara dengan M.Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011).

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai PKPU Jawa Tengah dalam upaya merubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* lewat program KSM, maka perlu untuk mewawancarai beberapa pihak yang terkait, baik dari pihak amil maupun *mustahiq*. Sedangkan dari *mustahiq* yaitu dengan Bapak Kariman yang mendapat bantuan dana zakat dari PKPU Jawa Tengah. Adapun hasil wawancara dengan beliau pada tanggal 30 Oktober 2011 sebagai berikut:

“Mula-mulanya saya dapat bantuan uang tunai dari PKPU sebesar Rp 400.000. Kemudian dana itu buat usaha jualan rokok dan tembakau. Hasil yang didapat dari jualan rokok dan tembakau kadang-kadang Rp 15.000 sampai Rp 30.000 perhari, Alhamdulillah mas, ada penambahan penghasilan walaupun sedikit, bisa dikatakan cukup untuk sekedar membeli sembako. Dibandingkan dengan penghasilan saya yang sebelumnya sebagai tukang sapu jalanan Rp 150.000 perbulan, untuk membeli sembako saja tidak cukup. Tetapi jika untuk soal lebih seperti layaknya orang lain masih belum mas. Dari hasil jualan rokok dan tembakau, saya bisa menyisihkan uang minimal Rp 15.000 perbulan kepada PKPU untuk perkembangan KSM selanjutnya.

Contoh lain proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* melalui program KSM yang dilakukan PKPU Jawa Tengah yaitu berupa pemberian ketrampilan membuat kue dari bahan dasar ketela pohon (singkong) yang dilaksanakan di daerah Pundak Payung Banyumanik. Sebagian besar beranggotakan ibu-ibu pengajian, mereka berasal dari kalangan keluarga kurang mampu. Kelompok ibu-ibu ini didirikan PKPU

Jawa Tengah pada bulan Mei 2011 dengan nama “Assolihah Mandiri” yang beranggotakan 10 ibu-ibu yang sebelumnya menganggur di rumah, lalu mempunyai inisiatif untuk membentuk usaha bersama dalam rangka membantu suami mereka menopang kehidupan rumah tangga. Waktu yang sebelumnya di rumah mereka tidak termanfaatkan dengan baik, kini mereka penuh dengan aktivitas yang berguna bahkan dapat menghasilkan uang dengan usaha membuat kue (Wawancara dengan M. Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011) .

Setiap pagi ibu-ibu ini berkumpul untuk belanja dan membuat kue hingga mendistribusikan yang sudah jadi. Meskipun mereka adalah ibu-ibu rumah tangga namun pengelolaan usaha dilakukan secara profesional dengan pembagian tugas yang tersusun rapi. Hasilnya cukup luar biasa, dalam dua minggu mereka bisa mendistribusikan 40 hingga 100 kotak kue setiap hari. Setiap kotak dihargai Rp 5.000, dengan omset yang didapat perhari sekitar Rp 200.000. Karena usaha ini merupakan usaha kelompok maka keuntungan yang didapat dibagi untuk 10 anggota. Sedangkan keuntungan untuk masing-masing anggota sekitar 10-15 persen dari omset perhari. Kotak-kotak kue ini mereka titipkan di sekolah maupun warung-warung yang ada. Di samping itu order pesanan untuk berbagai acara juga mulai banyak. Sebagaimana dituturkan oleh Ibu Ummi selaku ketua KSM Assolihah Mandiri, wawancara pada tanggal 31 Oktober 2011 sebagai berikut:

“Saya sangat bersyukur dengan masuk di KSM Assolihah Mandiri ini mas, penghasilan keluarga meningkat bisa memenuhi kebutuhan

keluarga sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak. Dari hasil penjualan kue ini, alhamdulillah saya bisa menyisihkan uang Rp 100.000 perbulan untuk ditabung.

Bila memperhatikan hasil wawancara bersama Bapak Kariman dan Ibu Ummi, model pendayagunaan zakat yang dijalankan oleh PKPU Jawa Tengah dalam memberdayakan *mustahiq* tergolong model produktif kreatif yang diwujudkan dengan bentuk permodalan untuk mengembangkan usaha kecil seperti usaha jualan rokok dan tembakau serta usaha pembuatan kue. Oleh karena itu, peneliti dapat mengatakan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan dan pembinaan bagi masyarakat kurang mampu yang dilakukan PKPU Jawa Tengah telah menunjukkan positif. Hal ini dapat diketahui lewat kegembiraan dari wajah dan kata-kata yang disampaikan oleh pihak penerima dana zakat dalam bentuk bantuan pinjaman modal usaha yang diserahkan kepada Bapak Kariman dan Ibu Ummi dalam bentuk uang tunai. Hal tersebut terbukti dari keberadaan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh lewat usaha yang dilakukan oleh Bapak Kariman dan Ibu Ummi yang didapatkan dari dana zakat telah cukup untuk biaya hidup di kota Semarang.

Dari sisi pendapatan yang mereka peroleh dari usaha penjualan rokok dan tembakau serta kue. Mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Hal ini, dapat dibuktikan dari jumlah uang yang mereka peroleh dalam sehari, misalnya Bapak Kariman perhari ia mendapatkan hasil berkisar Rp 15.000 sampai Rp 30.000,

sedangkan untuk KSM Ibu Ummi mendapatkan omset sekitar Rp 200.000 perhari. Karena usaha yang dilakukan Ibu Ummi adalah usaha kelompok maka keuntungan yang didapat oleh Ibu Ummi perharinya sekitar Rp 20.000 hingga Rp 30.000. Mereka juga diharuskan memiliki tabungan untuk keperluan jangka panjang misalnya untuk pendidikan anak, khitanan dan untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya tabungan mereka setiap bulannya dapat menyisihkan uang sebesar Rp 15.000 kepada PKPU untuk mengembangkan KSM selanjutnya.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PKPU Jawa Tengah selain membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat juga mengadakan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan memiliki Tujuan sebagai berikut: a) Mengurangi pengangguran; b) Membantu kaum dhuafa agar memiliki keterampilan siap kerja; c) Membantu lulusan agar dapat bekerja pada bidang yang dikuasai; d) Membantu lulusan agar mampu memiliki usaha mandiri dengan sistem bapak angkat; e) Membantu kalangan dunia usaha mendapatkan SDM yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Secara global tujuan dari pelatihan kewirausahaan adalah membekali para *mustahiq* agar memiliki keterampilan sehingga dapat mandiri (www.baznas.or.id,28/01/2010).

Berdasarkan tujuannya, pelatihan kewirausahaan dapat mendukung tugas pemerintah dalam memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi kaum miskin. Penghidupan yang layak atau "hak sosial rakyat" yang diberikan tidak hanya bersifat filantropis, melainkan dapat melaksanakan

pemberdayaan (*empowerment*) bagi rakyat. Suatu *empowerment* dikatakan berhasil apabila menghasilkan *self-empowerment* (Edi Swasono, 2010: 2). Apabila dihubungkan dengan pendayagunaan zakat, maka *self-empowerment* yaitu keadaan para *mustahiq* yang berhasil menjadi *muzakki*. Para *mustahiq* yang asalnya mendapatkan bagian zakat berubah menjadi orang yang dapat mengeluarkan zakat.

Pelatihan kewirausahaan yang dilakukan PKPU Jawa Tengah di antaranya; pelatihan pembuatan tas bagi pemuda pengangguran di Kudus. Pelatihan teknisi HP di Semarang dan Jepara serta pelatihan sablon di Semarang. Bagi mereka yang sudah mengikuti pelatihan kemudian diberikan kesempatan magang di perusahaan, bagi yang berkompetensi selanjutnya akan dipekerjakan di perusahaan tersebut (Dokumentasi PKPU dan wawancara dengan M. Miftahul Surur tanggal 26 Oktober 2011).

Sebagai bahan acuan, pihak PKPU menetapkan standar ukuran keberhasilan program pemberdayaan lewat KSM yaitu: 1) perubahan karakter dan pola pikir anggota; 2) adanya peningkatan penghasilan anggota; 3) bertambahnya ilmu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan anggota; 4) hemat menabung; 5) meningkatnya produktifitas anggota; 6) berjalannya program; dan 7) mudah direplikasi dengan dibentuknya unit-unit wilayah.

Pada bab tiga ini penulis telah membahas mengenai gambaran umum PKPU Jawa Tengah, pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh, proses pengumpulan dana dan proses pendayagunaan dana ZIS pada PKPU Jawa

Tengah serta proses perubahan status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah. Dalam pengumpulan dana, PKPU Jawa Tengah mempunyai kebijakan yaitu bahwa jenis dana yang dihimpun berupa dana zakat, infaq, shodaqoh, dana hibah dan dana sosial perusahaan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Adapun sumber dana PKPU Jawa Tengah berasal dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah. Sedangkan dalam pendayagunaan dana ZIS PKPU ada yang bersifat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan secara konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk santunan, sementara pendayagunaan secara produktif lebih di arahkan pada pemberdayaan *mustahiq*. Sebab program pemberdayaan *mustahiq* merupakan salah satu indikator mutu untuk melakukan perubahan yang lebih baik yaitu dari *mustahiq* menjadi *muzakki* atau minimal dari *mustahiq* menjadi *mushoddiq/munfiq*.

Kemudian dalam proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah melalui program pemberdayaan, penulis temukan bahwasanya *mustahiq* belum berubah menjadi *muzakki*, mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk dapat menjadi *muzakki* dibutuhkan manajemen pengelolaan yang profesional, baik di dalam penghimpunan zakat, pendistribusian dan pertanggungjawaban akuntabilitasnya, agar pesan syari'ah tentang zakat untuk merubah *mustahiq* menjadi *muzakki* dapat diwujudkan dalam satuan waktu tertentu sesuai yang direncanakan.

Data yang telah penulis peroleh dari penelitian ini, maka penulis akan menganalisis data-data tersebut yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya yaitu bab keempat. Adapun data yang akan penulis analisis yaitu mengenai pengelolaan ZIS pada PKPU Jawa Tengah mulai dari proses pengumpulan dana dan proses pendayagunaan dana ZIS, Serta analisis proses mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yang dilakukan PKPU Jawa Tengah.